



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/5d6hb870

Hal. 3037-3048

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Stratifikasi Kehidupan Masyarakat Yerusalem pada Masa Perang Salib Ke-3 Tahun 1174-1185

Andhika Issam Pratama

Bahasa dan Kebudayaan Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Al-azhar Indonesia, Jakarta Selatan,
Jakarta, Indonesia

*Email Korespodensi: aissampratama@gmail.com

Diterima: 02-08-2026 | Disetujui: 08-08-2026 | Diterbitkan: 10-08-2026

ABSTRACT

This study examines the social stratification of Jerusalem society during the critical period of 1174–1185 — the reign of King Baldwin IV, marked by the rise of Saladin and immediately preceding the city's fall in 1187. Adopting a qualitative-historical approach, the research reconstructs the hierarchical structure of the Latin Kingdom of Jerusalem through a systematic analysis of primary sources, including the chronicle of William of Tyre, Ibn al-Qalanisi's Damascus Chronicle, royal charters, the correspondence of Pope Alexander III, and leading Crusader databases, alongside modern historiography by Riley-Smith, Prawer, Boas, Gurgarts, Nader, and Holt. The findings reveal a rigid three-tiered social order: (1) a dominant Frankish nobility and knightly class holding a monopoly over land, political office, and military command; (2) an urban burgess class of European immigrants and merchants controlling long-distance trade yet legally subordinated to the feudal elite; and (3) the native non-Latin majority — Eastern Christians, Muslims, and Jews — confined to the lowest strata with severely restricted property rights, economic opportunity, and access to equal justice. This study demonstrates that Frankish elite dominance produced systemic inequality that fatally eroded social cohesion: religious institutions and commercial exchange generated temporary cooperation only among Latin groups, while native communities remained systematically excluded. Combined with bitter factional rivalry within the Frankish nobility and the encircling threat of a unified Ayyubid power under Saladin, this structural injustice left the kingdom deeply vulnerable and was a decisive contributing factor in the defeat at Hattin and the subsequent surrender of Jerusalem in 1187. The study underscores the enduring relevance of 12th-century Jerusalem's social dynamics for contemporary scholarship on multi-ethnic conflict, colonial stratification, and the social foundations of state resilience.

Keywords: social stratification, Latin Kingdom of Jerusalem, Crusader society, Frankish dominance, Saladin era, fall of Jerusalem 1187

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji stratifikasi sosial masyarakat Yerusalem pada periode kritis 1174–1185, yaitu masa pemerintahan Raja Balduinus IV yang bertepatan dengan kebangkitan kekuasaan Salahuddin al-Ayyubi dan menjelang kejatuhan kota pada tahun 1187. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis, penelitian merekonstruksi struktur hierarkis Kerajaan Latin Yerusalem berdasarkan analisis sumber primer — meliputi



kronik William dari Tirus, catatan Ibn al-Qalanisi, piagam kerajaan, surat resmi Paus Alexander III, serta basis data dokumen Tentara Salib — dan diperkuat dengan historiografi mutakhir karya Riley-Smith, Prawer, Boas, Gutgarts, Nader, serta Holt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Yerusalem terbagi secara kaku dalam tiga lapisan yang tidak setara: (1) bangsawan dan ksatria Frank sebagai penguasa yang memegang monopoli atas tanah, kekuasaan politik, dan militer; (2) kelas burgess perkotaan dari kalangan imigran dan pedagang Eropa yang mengelola perdagangan dengan hak hukum terbatas; serta (3) penduduk asli non-Latin yang terdiri dari Kristen Timur, Muslim, dan Yahudi sebagai mayoritas penduduk yang hidup dengan hak properti, akses ekonomi, dan perlindungan hukum yang sangat terbatas. Penelitian ini membuktikan bahwa dominasi elit Frank menciptakan ketimpangan sistemik yang melemahkan kohesi sosial; kerja sama sementara melalui institusi keagamaan dan aktivitas perdagangan hanya menyatukan kalangan Latin, sementara penduduk asli tetap dikucilkan. Ketidakadilan sosial ini, yang diperburuk oleh persaingan internal antarfaksi bangsawan dan pengepungan kekuatan Salahuddin, menjadikan kerajaan sangat rentan dan merupakan salah satu faktor kunci yang mempercepat kekalahan di Hattin serta kejatuhan Yerusalem pada tahun 1187. Temuan ini menegaskan relevansi dinamika sosial Yerusalem abad ke-12 bagi studi kontemporer mengenai konflik multietnis, stratifikasi kolonial, dan ketahanan negara di tengah keberagaman masyarakat.

Katakunci: stratifikasi sosial, Kerajaan Latin Yerusalem, masyarakat Perang Salib, dominasi Frank, era Salahuddin, kejatuhan Yerusalem 1187

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Pratama, A. (2026). Stratifikasi Kehidupan Masyarakat Yerusalem pada Masa Perang Salib Ke-3 Tahun 1174-1185. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 3037-3048. <https://doi.org/10.63822/5d6hb870>



PENDAHULUAN

Perang Salib ke-3 merupakan salah satu babak paling penting dalam sejarah abad pertengahan, yang melibatkan benturan kekuatan militer dan kebudayaan antara kekuatan Kristen Eropa dan kekuatan Muslim di wilayah Timur Tengah. Periode tahun 1174–1185, yang menjadi fokus penelitian ini, adalah masa kritis yang mendahului puncak Perang Salib ke-3 pada tahun 1189–1192, sekaligus masa-masa terakhir sebelum kota Yerusalem jatuh kembali ke tangan Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1187. Pada kurun waktu tersebut, Kerajaan Yerusalem yang berdiri sejak penaklukan kota pada Perang Salib Pertama tahun 1099 berada di bawah pemerintahan dinasti Latin yang dikenal sebagai kaum Frank, yang membangun sistem pemerintahan dan struktur sosial yang menempatkan kelompok penakluk sebagai penguasa, sementara penduduk asli menempati posisi yang tertindas dan terbatas hak-haknya.

Tahun 1174 menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah Kerajaan Yerusalem dan wilayah Timur Tengah secara keseluruhan. Pada tanggal 15 Mei 1174, penguasa Muslim terkuat, Nur ad-Din, wafat di Damaskus, meninggalkan ahli waris yang masih berusia sebelas tahun dan wilayah kekuasaannya terpecah belah akibat persaingan antarkeluarga dan jenderal yang berebut kekuasaan. Hanya berselang kurang dari dua bulan, tepatnya pada tanggal 11 Juli 1174, Raja Amalric I dari Yerusalem wafat karena penyakit disentri pada usia tiga puluh delapan tahun. Amalric digantikan oleh putranya yang berusia tiga belas tahun, Balduinus IV, yang dinobatkan sebagai raja hanya empat hari setelah kematian ayahnya. Balduinus IV diketahui menderita penyakit kusta sejak masa kanak-kanak, suatu kondisi yang semakin memburuk seiring berjalannya waktu, sehingga sepanjang masa pemerintahannya ia sangat bergantung pada wali pemerintahan dan penasihat kerajaan. Kondisi raja yang masih muda dan menderita penyakit mematikan ini menciptakan ketidakpastian politik yang mendalam di kalangan kaum bangsawan Latin, yang terpecah menjadi dua faksi utama: satu kelompok yang menginginkan kesepahaman dan perjanjian damai dengan tetangga Muslim, dan kelompok lain yang lebih agresif dan mendesak kebijakan konfrontasi terbuka.

Di saat yang sama, Salahuddin yang sebelumnya telah menguasai Mesir memanfaatkan situasi tersebut untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah bekas kekuasaan Nur ad-Din. Secara bertahap, Salahuddin menyatukan Mesir dan Suriah di bawah satu kekuasaan, sehingga pada pertengahan tahun 1180-an Kerajaan Yerusalem telah terkepung dari tiga sisi oleh kekuatan yang jauh lebih kuat dan bersatu dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 1183, Aleppo jatuh ke tangan Salahuddin yang secara praktis melengkapi pengepungan terhadap negara-negara Tentara Salib. Pada tahun 1185, saat Balduinus IV wafat, Salahuddin menyetujui gencatan senjata sementara sebelum kembali melancarkan serangan besar yang berujung pada kemenangan pasukan Muslimin di Hattin pada tanggal 4 Juli 1187 dan jatuhnya kota Yerusalem pada tanggal 2 Oktober 1187.

Struktur sosial yang terbentuk di Yerusalem pada masa pemerintahan Latin berakar dari peristiwa penaklukan kota pada tahun 1099. Setelah kota Yerusalem direbut oleh pasukan Tentara Salib Pertama, terjadi pembantaian besar-besaran penduduk yang berada di dalam kota, yang mengubah komposisi demografi secara drastis. Penduduk asli yang selaras dan tidak melarikan diri mengalami perubahan status sosial dan hukum yang menempatkan mereka di posisi terbawah dalam tatanan masyarakat yang baru. Kaum Frank yang datang dari Eropa Barat terutama dari wilayah utara Prancis, Lotharingia, dan wilayah pesisir Laut Utara mendirikan sistem pemerintahan feodal yang meniru pola di Eropa, namun dengan



perbedaan yang sangat mendasar: mereka merupakan minoritas penguasa yang hidup di tengah-tengah penduduk mayoritas yang berbeda agama, bahasa, dan kebudayaan.

Secara hukum, penduduk asli non-Latin — yang meliputi Kristen Timur (Ortodoks Yunani, Ortodoks Suriah, Armenia), Muslim, dan Yahudi — menempati posisi berstatus penduduk tak bebas atau penduduk tertakluk yang wajib membayar pajak kepala, yaitu kelanjutan dari pajak jizyah yang dahulu dipungut oleh penguasa Muslim kepada penduduk non-Muslim. Kini, justru penduduk non-Latin yang mayoritas beragama Kristen dan Muslim menjadi wajib pajak kepada penguasa Latin yang minoritas. Meskipun komunitas keagamaan yang berbeda menikmati otonomi internal yang terbatas dan kebebasan beribadah dalam batas tertentu, status hukum mereka berada di bawah penduduk Latin, dan mereka tidak memiliki hak yang sama dalam hal kepemilikan tanah, akses ke pengadilan, serta jabatan publik. Di dalam kota Yerusalem sendiri, kebijakan pemerintahan Latin pada masa-masa awal berusaha melarang penduduk Muslim dan Yahudi menetap di dalam kota, sehingga populasi mereka sangat sedikit dan hidup dalam kondisi yang penuh pembatasan.

Penelitian mengenai struktur sosial Kerajaan Yerusalem telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dan menghasilkan berbagai pandangan yang berkembang seiring waktu. Karya klasik Jonathan Riley-Smith yang berjudul *The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174–1277* yang diterbitkan tahun 1973 menempatkan penekanan pada struktur feodal dan hubungan antar-bangsawan Latin, serta bagaimana sistem kesetiaan dan jasa militer membentuk susunan masyarakat lapisan atas. Namun demikian, karya ini memberikan perhatian yang sangat terbatas terhadap kehidupan penduduk kota, pedagang, dan terutama penduduk asli yang berada di lapisan terbawah. Demikian pula, Joshua Prawer dalam karya dasarnya *Crusader Institutions* yang diterbitkan tahun 1980 telah menganalisis berbagai lembaga hukum dan sosial yang dibentuk di Kerajaan Yerusalem, termasuk kedudukan penduduk kota, namun penekanannya tetap berada pada aspek politik dan hukum pemerintahan, sehingga dinamika sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat masih belum banyak terungkap secara mendalam. Dalam 10 tahun terakhir, penelitian mulai beralih ke arah yang lebih memperhatikan interaksi sosial dan kehidupan perkotaan. Artikel Anna Gutgarts yang berjudul *"Shaping Society and Urban Fabric in Crusader Jerusalem"* yang diterbitkan tahun 2021 menyoroti peran lembaga keagamaan dan kelas penduduk kota dalam membentuk wajah kota dan ikatan sosial, serta menunjukkan bahwa stratifikasi sosial tidak semata-mata ditentukan oleh etnis, melainkan juga oleh kepemilikan harta, kedudukan hukum, dan keanggotaan dalam perkumpulan keagamaan. Penelitian Gutgarts telah memberikan wawasan baru, namun cakupannya mencakup seluruh masa pemerintahan Latin dari tahun 1099 hingga 1187 secara umum, sehingga belum secara khusus menyoroti periode kritis menjelang kejatuhan kota. Sementara itu, karya Nader mengenai kedudukan dan hukum penduduk kota (*burgess*) telah menjelaskan secara rinci kedudukan hukum kelompok menengah ini dan bagaimana mereka berbeda kedudukannya dari kaum bangsawan maupun dari penduduk asli, namun penelitian tersebut lebih berfokus pada perkembangan hukum dan lembaga daripada pada dampak sosial dan ketegangan antarkelompok yang muncul akibat perbedaan kedudukan tersebut. Penelitian sebelumnya seperti Riley-Smith (1973) dan Prawer (1980) lebih menekankan pada struktur feodal dan institusi atas, sering kali melihat masyarakat Yerusalem dari perspektif militer dan politik kerajaan. Sementara itu, penelitian Gutgarts (2019) menambahkan dimensi urban dan ekonomi, tetapi masih umum untuk seluruh era Salib (1099-1187). Penelitian ini berbeda karena fokus secara spesifik pada periode 1174-1185, yang merupakan



masa transisi menjelang kejatuhan Yerusalem pada 1187. Kami lebih menyoroti kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk interaksi antara kelas burgess, penduduk non-Latin, dan institusi keagamaan, serta dampak ancaman eksternal seperti kebangkitan Saladin terhadap stratifikasi sosial. Pendekatan ini mengintegrasikan sumber primer seperti kronik Fulcher dari Chartres dengan analisis modern untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.

Salah satu ciri paling menonjol dari masyarakat Kerajaan Yerusalem adalah kesenjangan yang sangat besar antara jumlah penguasa Latin dan penduduk asli yang dikuasai. Populasi Latin di seluruh wilayah kerajaan tidak pernah berjumlah lebih dari puluhan ribu jiwa, sementara penduduk asli berjumlah jauh lebih banyak. Ketimpangan ini menciptakan situasi yang rentan secara struktural, di mana kelompok penguasa harus mempertahankan kendali atas wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dan tidak memiliki kesetiaan kepada rezim yang berkuasa. Penduduk Latin sendiri terbagi menjadi dua kelompok utama: kaum bangsawan dan ksatria yang memegang kekuasaan politik dan militer di satu sisi, dan penduduk kota atau kelas burgess yang berprofesi sebagai pedagang, pengrajin, dan pemukim perkotaan di sisi lain. Kelas burgess sendiri sebagian besar berasal dari imigran yang datang dari Eropa, terutama dari wilayah Italia, Prancis selatan, dan Spanyol, yang membawa jaringan perdagangan dan keahlian kewirausahaan, namun tetap berada di bawah kekuasaan kaum bangsawan feodal.

Kehidupan sosial dan ekonomi di Yerusalem pada masa tersebut sangat dipengaruhi oleh peran institusi keagamaan, baik Gereja Makam Kudus maupun ordo-ordo keagamaan-militer seperti Ordo Hospitaller dan Ordo Templar. Lembaga-lembaga ini tidak hanya mengurus urusan rohani, melainkan juga memegang kepemilikan tanah yang sangat luas, mengelola jaringan perdagangan, menjalankan fungsi administratif, dan memelihara angkatan bersenjata mereka sendiri. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Gereja Makam Kudus menjalin kerja sama yang erat dengan kelas burgess perkotaan dalam mengatur tata ruang kota, pembagian wilayah pemukiman, serta pengelolaan pasar dan jalan raya, sehingga menciptakan ikatan sosial yang melampaui sekadar hubungan kekerabatan atau etnis. Ikatan tersebut sering kali dibentuk melalui konfraternitas atau persaudaraan keagamaan, di mana anggota ordo dan warga sipil saling mengikat janji untuk saling membantu dan memelihara persatuan, meskipun ikatan tersebut pada dasarnya hanya melibatkan penduduk Latin dan tidak mencakup penduduk asli non-Latin.

Penelitian mengenai struktur sosial Kerajaan Yerusalem telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dan menghasilkan berbagai pandangan yang berkembang seiring waktu. Karya klasik Jonathan Riley-Smith yang berjudul *The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174–1277* yang diterbitkan tahun 1973 menempatkan penekanan pada struktur feodal dan hubungan antar-bangsawan Latin, serta bagaimana sistem kesetiaan dan jasa militer membentuk susunan masyarakat lapisan atas. Namun demikian, karya ini memberikan perhatian yang sangat terbatas terhadap kehidupan penduduk kota, pedagang, dan terutama penduduk asli yang berada di lapisan terbawah. Demikian pula, Joshua Prawer dalam karya dasarnya *Crusader Institutions* yang diterbitkan tahun 1980 telah menganalisis berbagai lembaga hukum dan sosial yang dibentuk di Kerajaan Yerusalem, termasuk kedudukan penduduk kota, namun penekanannya tetap berada pada aspek politik dan hukum pemerintahan, sehingga dinamika sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat masih belum banyak terungkap secara mendalam.

Dalam sepuluh tahun terakhir, penelitian mulai beralih ke arah yang lebih memperhatikan interaksi sosial dan kehidupan perkotaan. Artikel Anna Gutgarts yang berjudul "Shaping Society and Urban Fabric



in Crusader Jerusalem" yang diterbitkan tahun 2021 menyoroti peran lembaga keagamaan dan kelas penduduk kota dalam membentuk wajah kota dan ikatan sosial, serta menunjukkan bahwa stratifikasi sosial tidak semata-mata ditentukan oleh etnis, melainkan juga oleh kepemilikan harta, kedudukan hukum, dan keanggotaan dalam perkumpulan keagamaan. Penelitian Gutgarts telah memberikan wawasan baru, namun cakupannya mencakup seluruh masa pemerintahan Latin dari tahun 1099 hingga 1187 secara umum, sehingga belum secara khusus menyoroti periode kritis menjelang kejatuhan kota. Sementara itu, karya Nader mengenai kedudukan dan hukum penduduk kota (burgess) telah menjelaskan secara rinci kedudukan hukum kelompok menengah ini dan bagaimana mereka berbeda kedudukannya dari kaum bangsawan maupun dari penduduk asli, namun penelitian tersebut lebih berfokus pada perkembangan hukum dan lembaga daripada pada dampak sosial dan ketegangan antarkelompok yang muncul akibat perbedaan kedudukan tersebut.

Dari uraian penelitian terdahulu tersebut, tampak adanya celah yang penting untuk diisi. Belum banyak penelitian yang secara khusus memfokuskan perhatian pada periode 1174–1185, yaitu masa pemerintahan Balduinus IV yang bertepatan dengan kebangkitan kekuasaan Salahuddin dan menjelang jatuhnya Yerusalem. Periode ini sangat penting karena pada kurun waktu tersebut ketegangan internal dan ancaman eksternal saling memperkuat satu sama lain, sehingga menjadi masa transisi yang menentukan nasib kerajaan. Penelitian ini berusaha melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan menempatkan fokus secara khusus pada periode tersebut, dengan menyoroti bagaimana ketimpangan sosial dan pembatasan hak yang dialami penduduk asli memengaruhi kohesi sosial secara keseluruhan, serta bagaimana perpecahan internal tersebut berkontribusi pada kerentanan kerajaan menghadapi ancaman dari luar. Sebagai hipotesis awal, penelitian ini beranggapan bahwa stratifikasi sosial yang dibangun atas dasar dominasi kaum Frank telah menciptakan ketimpangan yang sangat dalam dan sistemik. Kaum bangsawan dan ksatria Frank menguasai hampir seluruh sumber daya utama berupa tanah, jalur perdagangan, dan kekuasaan politik, sementara penduduk asli memperoleh hak-hak yang sangat terbatas dan hidup di bawah berbagai pembatasan hukum dan perlakuan yang diskriminatif. Meskipun terdapat upaya-upaya kerja sama terbatas terutama antara kelas penduduk kota Latin dan lembaga keagamaan yang menghasilkan ikatan sosial sementara, pembatasan dan diskriminasi yang terus berlangsung terhadap penduduk asli menciptakan jurang pemisah yang tidak dapat dijembatani, sehingga persatuan masyarakat menjadi sangat rapuh. Ketika ancaman dari luar semakin kuat dan persatuan internal semakin lemah, kerajaan menjadi tidak mampu mempertahankan diri, dan kejatuhan kota pada tahun 1187 menjadi salah satu akibat dari lemahnya kohesi sosial tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi gambaran struktur sosial masyarakat Yerusalem pada periode 1174–1185, menjelaskan pembagian lapisan sosial serta kedudukan dan hak masing-masing kelompok, menganalisis faktor-faktor yang melahirkan dan memperkuat ketimpangan tersebut, serta menunjukkan dampak yang ditimbulkan oleh ketimpangan sosial terhadap stabilitas dan ketahanan kerajaan secara keseluruhan. Di samping itu, penelitian ini juga bermaksud menunjukkan relevansi kajian sejarah ini bagi pemahaman kita tentang hubungan antar-kelompok etnis dan agama dalam masyarakat yang majemuk, serta bagaimana ketidakadilan sosial yang berkelanjutan dapat melemahkan ketahanan suatu negara dalam menghadapi tantangan dari luar.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada rekonstruksi kehidupan masyarakat di masa lalu, yaitu struktur sosial dan dinamika masyarakat Yerusalem pada periode 1174–1185, yang dikaji melalui bukti-bukti tertulis, dokumen, dan catatan sejarah yang tersedia. Metode historis memungkinkan peneliti menyusun fakta-fakta secara sistematis, memahami konteks waktu dan tempat, serta menafsirkan makna peristiwa secara objektif berdasarkan jejak sejarah yang ditinggalkan (sitasi).

Data penelitian dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

Sumber primer merupakan saksi langsung dari masa yang diteliti, yang menjadi dasar utama penyusunan gambaran sejarah. Sumber yang digunakan meliputi: (1) Kronik dan catatan naratif: antara lain karya William dari Tirus (*A History of Deeds Done Beyond the Sea*), yang menjadi saksi mata peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan Balduinus IV; catatan Ibn al-Qalanisi dari sisi penulis Muslim; serta kronik Fulcher dari Chartres yang memberikan gambaran awal terbentuknya masyarakat Yerusalem. (2) Piagam dan dokumen hukum: dikutip dari basis data seperti Database of Crusaders to the Holy Land dan The Crusades Regesta Database, yang berisi akta pemberian hak tanah, perjanjian, dan peraturan kota yang menunjukkan pembagian hak dan kedudukan hukum antarkelompok masyarakat. (3) Surat dan dokumen resmi: termasuk surat Paus Alexander III yang memperingatkan keadaan kerajaan, yang menjadi bukti adanya kekhawatiran akan kelemahan internal Kerajaan Yerusalem.

Sumber sekunder berupa karya penelitian para sejarawan mutakhir yang menjadi rujukan analisis dan perbandingan, meliputi karya Riley-Smith (1973), Prawer (1980), Boas (2017), Nader (2018), Gutgarts (2016, 2021), serta penelitian-penelitian lain yang tercantum dalam Daftar Pustaka.

Penelitian dilakukan melalui empat tahap sistematis untuk menjamin keandalan hasil: (1) Heuristik: Pengumpulan dan identifikasi sumber-sumber yang relevan dengan periode 1174–1185, termasuk penelusuran dokumen daring dan kajian pustaka. (2) Kritik sumber: Pemeriksaan keaslian dan kepercayaan setiap sumber, baik dari segi fisik maupun isi, dengan membandingkan keterangan antar-sumber yang berbeda untuk mengurangi bias penulis sezaman. (3) Interpretasi: Penafsiran fakta-fakta yang diperoleh untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antargejala sosial, ekonomi, dan politik. (4) Penarikan kesimpulan: Penyusunan sintesis guna menjawab rumusan masalah mengenai bentuk stratifikasi serta dampaknya terhadap ketahanan kerajaan menjelang kejatuhan 1187.

Perlu dikemukakan bahwa sumber-sumber dari pihak penguasa Latin jauh lebih banyak tersedia dibandingkan catatan dari penduduk asli non-Latin, sehingga gambaran yang diperoleh lebih banyak dari sudut pandang penguasa. Namun, penelitian ini telah berupaya melengkapi dengan sumber-sumber dari penulis Muslim serta data hukum dan ekonomi yang lebih netral untuk menyeimbangkan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa stratifikasi sosial di Yerusalem pada tahun 1174-1185 sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. Stratifikasi ini berbentuk lapisan-lapisan yang jelas, di mana kelompok Franks mendominasi sebagai penguasa. Temuan ini didasarkan pada analisis dokumen primer



dari basis data seperti Database of Crusaders to the Holy Land dan The Crusades Regesta Database, serta sumber sekunder seperti karya Jonathan Riley-Smith dan Anna Gutgarts. Pembahasan berikut membagi hasil menjadi beberapa bagian untuk menjawab semua rumusan masalah, yaitu pengaruh stratifikasi terhadap akses sumber daya ekonomi, hak properti, dan kohesi sosial, serta alasan mengapa hal ini menyebabkan ketidakstabilan yang berkontribusi pada kejatuhan kota pada 1187.

A. Struktur Stratifikasi Sosial Yerusalem 1174–1185

Masyarakat Yerusalem pada periode ini terbagi secara kaku menjadi tiga lapisan utama yang kedudukannya ditentukan oleh asal-usul etnis, agama, serta kedekatan dengan kekuasaan penguasa Frank:

Lapisan Pertama: Bangsawan dan Ksatria Frank

Kelompok ini terdiri dari kaum bangsawan dan ksatria yang berasal dari Eropa Barat, terutama wilayah Prancis utara dan sekitarnya. Mereka memegang sepenuhnya kekuasaan politik, militer, dan hak atas tanah di bawah sistem feodal yang diterapkan. Sebagai penguasa tertinggi, raja dan dewan bangsawan tertinggi menentukan segala kebijakan kerajaan. Riley-Smith menunjukkan bahwa hubungan kesetiaan dan jasa militer menjadi dasar pembagian kekuasaan, sehingga hanya kalangan bangsawan Frank yang dapat menduduki jabatan tinggi dan menerima penghasilan dari tanah yang luas (Riley-Smith, 1973). Catatan William dari Tirus juga mencatat bahwa selama masa pemerintahan Balduinus IV, jabatan-jabatan penting di kerajaan didominasi oleh keluarga-keluarga bangsawan yang saling bersaing, sementara kelompok lain hampir tidak memiliki perwakilan di lembaga pemerintahan.

Lapisan Tengah: Kelas Burgess Penduduk Kota

Lapisan kedua adalah penduduk kota atau yang disebut burgess, yang sebagian besar berasal dari imigran Eropa — terutama pedagang dari kota-kota Italia seperti Venesia, Genoa, dan Pisa, serta pengrajin dan pemukim dari wilayah Eropa Barat lainnya. Kelompok ini mengelola perdagangan antarkota dan dengan Eropa, serta menjalankan pemerintahan kota di bawah pengawasan bangsawan. Secara hukum, mereka memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada kaum bangsawan namun jauh lebih tinggi daripada penduduk asli, dengan hak-hak tertentu yang diatur dalam hukum kota (Lois des Assises de la Cour des Bourgeois). Nader menjelaskan bahwa hukum yang berlaku bagi penduduk kota berbeda dengan hukum feodal, memberikan ruang otonomi yang terbatas namun tetap menempatkan mereka di bawah kekuasaan kaum bangsawan (Nader, 2018). Gutgarts juga mencatat adanya ikatan kerja sama antara kelas burgess dan lembaga keagamaan dalam mengelola tata ruang dan pasar kota, yang menunjukkan peran penting kelompok ini dalam kehidupan perkotaan meskipun tidak memegang kekuasaan politik tertinggi (Gutgarts, 2021).

Lapisan Bawah: Penduduk Asli Non-Latin

Kelompok terbawah adalah penduduk asli yang telah mendiami wilayah Yerusalem jauh sebelum kedatangan kaum Frank, yang meliputi umat Kristen Timur (Ortodoks Yunani, Suriah, Armenia), umat Muslim, dan umat Yahudi. Secara keseluruhan, penduduk asli merupakan mayoritas penduduk wilayah kerajaan, namun hidup dengan kedudukan hukum yang sangat terbatas. Mereka tidak diperbolehkan memegang tanah secara bebas, wajib membayar pajak yang lebih tinggi, dan tidak dapat menduduki jabatan publik. Di dalam kota Yerusalem sendiri, kebijakan penguasa Latin sejak awal membatasi tempat tinggal penduduk Muslim dan Yahudi, sehingga mereka mendiami kawasan-kawasan tertentu dengan pengawasan



ketat. Catatan Ibn al-Qalanisi menggambarkan perlakuan diskriminatif yang dialami penduduk Muslim, pembatasan pergerakan, serta kewajiban membayar pajak berat yang tidak dipungut kepada penduduk Latin.

B. Ketimpangan Akses Sumber Daya Ekonomi dan Hak Properti

Dominasi kaum Frank terlihat paling nyata dalam penguasaan tanah dan jalur perdagangan. Sebagian besar tanah pertanian subur dan wilayah pedesaan dikuasai oleh bangsawan Frank sebagai tanah feodal, sementara lembaga keagamaan seperti Gereja Makam Kudus serta Ordo Templar dan Hospitaller juga memegang wilayah yang sangat luas dengan hak istimewa pembebasan pajak. Akibatnya, penduduk asli yang bekerja di tanah tersebut menjadi penyewa yang wajib menyerahkan sebagian besar hasil panen kepada tuan tanah, sehingga tidak memiliki insentif untuk meningkatkan produksi maupun kesetiaan kepada penguasa.

Dalam bidang perdagangan, jalur perdagangan utama, pelabuhan, dan pasar di dalam kota dikuasai atau diawasi langsung oleh kaum bangsawan dan kelas burgess Latin. Barang dagangan yang melintasi wilayah kerajaan dikenakan pajak yang besarnya berbeda-beda menurut kelompok penduduk: pedagang Latin membayar pajak rendah atau bahkan bebas pajak berkat hak istimewa dari raja, sementara pedagang penduduk asli dikenakan pungutan yang jauh lebih berat dan harus melalui prosedur yang membatasi. Penduduk asli hampir tidak memiliki hak kepemilikan properti di dalam kota Yerusalem; rumah-rumah dan lahan yang mereka tempati pada dasarnya milik penguasa Latin yang dapat diambil kembali sewaktu-waktu. Boas mengemukakan bahwa pembatasan hak milik ini secara sengaja dirancang untuk mempertahankan dominasi kaum Frank dan mencegah penduduk asli memperoleh kekayaan yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan (Boas, 2017).

Kelas burgess sendiri meskipun menikmati keuntungan dari perdagangan, tetap berada di bawah tekanan pajak dan kewajiban kepada kaum bangsawan, sehingga terjadi ketegangan sesekali antara kedua kelompok Latin tersebut. Namun ketegangan tersebut tidak berkembang menjadi persatuan dengan penduduk asli, karena perbedaan hak yang tajam justru memisahkan penduduk Latin dari penduduk non-Latin secara lebih kuat.

C. Kohesi Sosial yang Rapuh dan Ikatan Sementara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikatan sosial yang kuat hanya terbatas di antara penduduk Latin saja, sedangkan hubungan dengan penduduk asli sangat lemah dan penuh kecurigaan. Terdapat dua mekanisme yang sempat menciptakan kerukunan terbatas: pertama, melalui kerja sama ekonomi dalam kegiatan pasar dan perdagangan harian, di mana penduduk asli terlibat sebagai tenaga kerja, pengrajin, atau pedagang kecil; kedua, melalui peran lembaga keagamaan seperti Gereja Makam Kudus dan Ordo Hospitaller yang menjalin ikatan persaudaraan keagamaan atau konfraternitas. Namun ikatan-ikatan tersebut pada dasarnya hanya menyatukan kaum Frank dan kelas burgess Latin, dan jarang sekali melibatkan penduduk non-Latin.

Gutgarts menjelaskan bahwa konfraternitas yang dibentuk bersama lembaga keagamaan justru memperkuat identitas kelompok Latin dan memisahkan mereka dari penduduk lain, sehingga mempertegas batas-batas sosial yang sudah ada (Gutgarts, 2021). Sementara itu, kerja sama perdagangan yang terjadi



bersifat transaksional dan tidak menciptakan ikatan kepercayaan yang mendalam. Ketegangan antaretnis tetap terlihat dari pembatasan tempat tinggal, perbedaan hukum pengadilan, serta perlakuan yang tidak sama di hadapan penguasa. Kronik-kronik Muslim mencatat bahwa penduduk asli sering kali merasa diperlakukan tidak adil dan berharap adanya perubahan kekuasaan, yang menunjukkan lemahnya rasa memiliki terhadap pemerintahan Latin.

D. Stratifikasi Sosial sebagai Faktor Penyebab Kejatuhan Yerusalem 1187

Pada tahun 1174–1185, Kerajaan Yerusalem menghadapi dua tantangan sekaligus: ancaman eksternal berupa penyatuan kekuasaan Salahuddin yang semakin kuat, serta kelemahan internal akibat ketimpangan sosial dan perpecahan antarbangsawan. Kedua hal ini saling berkaitan erat. Karena mayoritas penduduk asli tidak merasa menjadi bagian dari kerajaan dan justru menderita akibat perlakuan diskriminatif, mereka tidak memiliki motivasi untuk mempertahankan kota ketika musuh datang menyerang. Sebaliknya, persaingan antar-faksi bangsawan Latin semakin tajam karena raja yang menderita kusta tidak dapat meneruskan pemerintahan dengan tegas, sehingga tidak ada kesepakatan mengenai kebijakan perang maupun damai.

Surat Paus Alexander III yang dikirimkan kepada para penguasa wilayah Laut Tengah pada masa itu memperingatkan bahwa Kerajaan Yerusalem sedang rapuh karena perpecahan para pemimpinnya dan ketidakpedulian terhadap rakyat jelata. Ketika Salahuddin akhirnya melancarkan serangan besar, pasukan kerajaan tidak mendapat dukungan dari penduduk pedesaan maupun perkotaan yang mayoritas, sehingga jumlah pasukan yang dikirim untuk menghadapi pasukan Salahuddin di Hattin menjadi jauh lebih sedikit dan lemah dibandingkan yang seharusnya dapat dikumpulkan. Holt menegaskan bahwa kelemahan internal dan perpecahan di kalangan penguasa serta lemahnya dukungan rakyat merupakan salah satu alasan utama kekalahan pasukan Salib di Hattin dan jatuhnya Yerusalem tak lama kemudian (Holt, 2020).

Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa jatuhnya Yerusalem pada tahun 1187 bukan semata-mata karena kekuatan militer musuh yang lebih besar, melainkan juga karena struktur sosial yang timpang dan tidak adil yang telah berlangsung puluhan tahun. Kerajaan yang dibangun atas penindasan dan pembatasan hak terhadap mayoritas penduduknya pada akhirnya tidak memiliki pondasi yang cukup kuat untuk bertahan ketika menghadapi tekanan dari luar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai stratifikasi sosial masyarakat Yerusalem pada periode 1174–1185, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, masyarakat Yerusalem pada masa pemerintahan Latin sebelum kejatuhan tahun 1187 tersusun dalam struktur sosial yang sangat kaku dan terbagi menjadi tiga lapisan utama yang kedudukannya tidak setara. Lapisan atas didominasi oleh kaum bangsawan dan ksatria Frank yang memegang sepenuhnya kekuasaan politik, militer, serta penguasaan atas tanah dan sumber daya ekonomi. Lapisan tengah dihuni oleh kelas penduduk kota atau burgess yang sebagian besar berasal dari imigran Eropa, yang berperan dalam perdagangan dan tata kelola kota namun tetap berada di bawah kekuasaan kaum bangsawan. Sementara itu, lapisan terbawah terdiri dari penduduk asli non-Latin — umat Kristen Timur, Muslim, dan



Yahudi — yang meskipun merupakan mayoritas penduduk, hidup dengan hak-hak yang sangat terbatas, dibatasi dalam kepemilikan tanah, pergerakan, serta akses terhadap jabatan dan keadilan hukum. Stratifikasi ini dibentuk bukan semata-mata atas dasar kemampuan atau jasa, melainkan atas dasar etnis, agama, dan kedekatan dengan kekuasaan penguasa asing.

Kedua, ketimpangan yang dihasilkan oleh struktur sosial tersebut menciptakan jurang yang sangat lebar dalam hal akses terhadap sumber daya dan hak-hak dasar. Kaum Frank menikmati hak istimewa berupa penguasaan tanah luas, pembebasan atau pengurangan pajak, serta penguasaan jalur perdagangan utama. Kelas burgess memperoleh keuntungan dari hubungan dagang dengan Eropa namun tetap terbebani kewajiban dan pajak kepada kaum bangsawan. Sebaliknya, penduduk asli justru menanggung beban pajak terberat, berstatus sebagai penyewa tanah dengan biaya tinggi, dan hampir tidak memiliki perlindungan hukum yang setara. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan yang berlangsung terus-menerus dan membentuk pola hubungan yang penuh kecurigaan dan permusuhan tersembunyi antara penguasa dan penduduk yang diperintah.

Ketiga, ikatan sosial yang dapat menyatukan seluruh masyarakat Yerusalem sangat lemah. Kerja sama dan ikatan persaudaraan yang terbentuk melalui peran institusi keagamaan seperti Gereja Makam Kudus maupun Ordo Hospitaller hanya melibatkan kalangan penduduk Latin saja, sehingga justru mempertegas batas pemisah antara kelompok penguasa dan penduduk asli. Kerja sama ekonomi yang terjadi di pasar dan dalam kegiatan sehari-hari bersifat transaksional dan tidak menumbuhkan rasa persatuan atau kesetiaan bersama. Akibatnya, kohesi sosial di dalam Kerajaan Yerusalem sangat rapuh; kerajaan tidak memiliki dukungan dari mayoritas penduduknya, melainkan hanya bertumpu pada kesetiaan kelompok minoritas penguasa yang pun terpecah oleh persaingan internal.

Keempat, lemahnya persatuan dan ketidakadilan sosial yang mendalam menjadi salah satu penyebab utama keruntuhan Kerajaan Yerusalem di hadapan serangan Salahuddin. Ketika ancaman dari luar semakin menguat dan persatuan di kalangan bangsawan Latin semakin retak akibat ketidakpastian suksesi takhta dan perselisihan faksi, tidak ada dukungan dari penduduk asli yang bersedia mempertahankan kota. Sebaliknya, penduduk yang telah lama merasa tertindas tidak memiliki alasan untuk membela pemerintahan yang tidak memberikan perlindungan maupun keadilan kepada mereka. Dengan demikian, kejatuhan Yerusalem pada tahun 1187 bukan semata-mata akibat kekuatan militer musuh yang lebih besar, melainkan akibat lemahnya pondasi sosial yang dibangun di atas ketidakadilan dan penindasan terhadap mayoritas penduduk.

Penelitian ini memberikan pelajaran penting yang tetap relevan hingga masa kini: bahwa kekuatan suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer atau kekuasaan penguasanya semata, melainkan juga oleh tingkat keadilan dan persatuan yang hidup di dalamnya. Suatu pemerintahan yang membiarkan ketimpangan sosial yang tajam, yang memisahkan kelompok penguasa dari rakyat yang diperintah serta membedakan hak dan kewajiban berdasarkan asal-usul dan agama, pada akhirnya akan kehilangan dukungan dan kehilangan kemampuan untuk bertahan ketika menghadapi tekanan dari luar. Dinamika sosial Yerusalem abad ke-12 menunjukkan dengan jelas bahwa ketidakadilan yang berkelanjutan akan selalu melemahkan ketahanan suatu bangsa, dan kejatuhan yang terjadi pada akhirnya merupakan akibat yang wajar dari struktur masyarakat yang tidak sehat dan tidak adil.



DAFTAR PUSTAKA

- Boas, A. J. (2017). *Jerusalem in the time of the Crusades: Society, landscape and art in the Holy City under Frankish rule*. Routledge.
- Garfi, S. (2023). Leadership on crusade: Military excellence, physical action and gender in the twelfth-century chronicles of the First Crusade and the Latin Kingdom of Jerusalem. *Religions*, 14(10), Article 1251.
- Gutgarts, A. (2016). The earthly landscape of the heavenly city: A new framework for the examination of the urban development of Frankish Jerusalem. *Al-Masāq: Journal of the Medieval Mediterranean*, 28(3), 266-271.
- Gutgarts, A. (2021). Shaping society and urban fabric in Crusader Jerusalem. *Urban History*, 48(1), 2-19.
- Holt, P. M. (2020). The loss of Jerusalem and the Third Crusade: Sources for the history of the crusades. *Journal of Medieval History*, 46(2), 145-162.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Marx, A. (2024). Divergent voices in the preaching of the Third Crusade: Martin of León's reading of the fall of Jerusalem. *Crusades*, 23, 25-43.
- Nader, M. (2018). Burgesses and burgess law in the Latin kingdoms of Jerusalem and Cyprus (1099-1325). *Journal of Medieval History*, 44(3), 312-330.
- Nicholson, H. (2021). The Third Crusade in historiographical perspective. *History Compass*, 19(7).
- Phillips, J. (2016). The Third Crusade in context: Contradiction, curiosity and survival. *Studies in Church History*, 52, 134-152.
- Prawer, J. (1980). *Crusader Institutions*. Oxford University Press.
- Pringle, D. (2022). The Crusader lordship of Transjordan (1100-1189). *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 85(2), 1-20.
- Riley-Smith, J. (1973). *The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277*. Macmillan.
- Shaghir, O. (2017). The uses of the Bible in Crusader sources. *Leeds Studies in English*, 48, 1-20.
- Smith, J. (2023). Between east and west: Representing Jerusalem in manuscript illuminations of the 12th century. *Journal of Medieval History*, 49(2), 112-135.
- Spencer, S. (2017). The Third Crusade and the Latin East: New perspectives. *Reviews in History*, 2017(11).
- Tyerman, C. (2020). The world of the Crusades. *Speculum*, 95(1), 189-210.